

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. (2023). *Menguak Tabir Hukum*. Cetakan keempat. Kencana. Jakarta.
- Amiruddin & Asikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Chazawi, Adami. (2017) *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. edisi revisi. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Efendi, Jonaedi. (2018). *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: berbasis nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*. Kencana. Depok.
- Hamzah, A. (2001). *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*. Pusat Studi Hukum Pidana. Jakarta.
- _____ (2007). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (edisi revisi). PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- _____ (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hiariej, Eddy, O.S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006) *Buku Saku Korupsi*. Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta.
- Marzuki, Peter mahmud. (2008). *Pengantar ilmu hukum*. Kencana. Jakarta.
- O. Notohamidjojo. (2011). *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Griya Media. Salatiga.
- Rahardjo, S. (2009). *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta.

- Rasyid, A.M., & Raghil, F. (2016). *Hukum Pidana*. Setara Press. Malang.
- Rifai, Ahmad. (2011). *Penemuan Hukum Oleh Hakim: dalam perspektif hukum progresif*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Soekanto, S. (2013). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Press. Jakarta.
- Sunardi, Tanuwijaya, D., & Wahid, A. (2005). *Republik "kaum tikus"; Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM*. Edsa Mahkota, Jakarta.
- Syahrani, R. (2004). *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Yanto, O. (2020). *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum*. Pustaka Reka Cipta. Bandung.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, (Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660)..
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Jurnal

Darmika, I. (2016). *Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*, Vol. 2 No. 3. hlm 429-435. Jurnal Hukum to-ra. <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1114/941>

Nahak, Alfonsus. (2023). *Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch*. Vol. 2 No. 3. hlm 11659-11674. Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora. <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/386>

Noviacahyani, W., & Sudarti, E. (2022). *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Vol. 3 No. 3. hlm 264-282. PAMPAS: Journal of Criminal Law <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.23585>

Salman, O., & Susanto, A.F. (2005). *Memaknai Kembali Konstitusi Kita (Holisme Pembangunan Hukum Di Indonesia)*. Vol. 7 No. 2. hlm 120-132. Jurnal Ilmu-ilmu social dan Humaniora. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v7i2.5544>.

Susanto, N. A. (2014). *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*. VOL. 7 No. 3. hlm 213–235. Jurnal Yudisial. <https://doi.org/10.29123/jy.v7i3.73>

Internet

Andaya, D., Easter, L., Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022: Korupsi Lintas Trias Politika, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2023, <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi%20Laporan%20Tren%20Penindakan%20Korupsi%20Tahun%202022.pdf>, diakses pada tanggal 1 Desember 2023.

Andaya, D., Easter, L., Ramadhana, K., *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2022, <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan%20Tren%20Penindakan%20Kasus%20Korupsi%20Tahun%202021.pdf>, diakses pada tanggal 20 Desember 2023.

Alamsyah, W., *Kinerja Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2020*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2021, <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/210101->

[Tren%20Penindakan%20Korupsi%20Tahun%202020.pdf](#), diakses pada tanggal 20 Desember 2023.

Draft Awal Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, <https://www.dpr.go.id/arsip/indexlg/id/91>, diakses pada 11 Mei 2024.

Draft Final Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi <https://www.dpr.go.id/arsip/indexlg/id/91>, diakses pada 11 Mei 2024.

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Fraksi-Fraksi DPR-RI Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi <https://www.dpr.go.id/arsip/indexlg/id/91>, diakses pada 11 Mei 2024.

Indonesia Corruption Watch., *Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat (edisi revisi 2015)*, https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/NA_dan_RUU_Tipikor.pdf, diakses pada tanggal 1 Desember 2023.

Jimly Asshiddiqie. (2012). Makalah Penegakan Hukum, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada tanggal 1 Desember 2023.

Risalah Rapat Kerja DPR-RI tanggal 10 Oktober 2001 <https://www.dpr.go.id/arsip/indexlg/id/91>, diakses pada 11 Mei 2024.

Surat presiden Nomor: R .10/PU/IV /2001 perihal Rancangan Undang-undang tentang di Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Jakarta Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<https://www.dpr.go.id/arsip/indexlg/id/91>, diakses pada 11 Mei 2024.